

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Manajemen Pendidikan

Sorotan tentang manajemen pendidikan cukup luas lingkupnya, maka sebelum diuraikan lebih jauh sangat perlu untuk diketahui lebih dahulu tentang konsep dasar manajemen pendidikan.

a. Pengertian Etimologi Manajemen Pendidikan

Pengertian manajemen pendidikan menurut etimologi terdiri dari dua unsur yaitu, manajemen dan pendidikan. Manajemen menurut asal katanya berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata benda "*manus*" (tangan) dan kata kerja "*agere*" (melakukan). Gabungan dua kata itu menjadi "*managere*" yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan dalam kata kerja Bahasa Inggris "*to manage*" (mengelola), dalam kata benda *management* artinya pengelolaan, dan "manager" untuk orang yang melakukannya. Manajemen diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menjadi manajemen (pengelolaan) (Usman, 2013: 5-6).

Pengertian manajemen pendidikan sebagai struktur atau tugas. Bila dikaji dengan pendekatan struktur atau tugasnya, maka manajemen pendidikan diartikan sebagai manajemen peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, fasilitas, pengorganisasian, ketatalaksanaan. Sedangkan berdasarkan pendekatan sebagai proses, manajemen pendidikan didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk

mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Usman, 2013: 14). Pengertian lainnya manajemen pendidikan adalah mengenai segala upaya menggerakkan kegiatan orang-orang dengan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya selebihnya, agar mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien (Sulistiyono & Maisaroh, 2018: 43).

Berdasarkan pengertian tersebut manajemen pendidikan tersebut, maka secara praktis manajemen pendidikan adalah suatu proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan, dalam mengelola segala sumber daya yang berupa manusia, uang, material, metode, mesin, market, waktu, dan informasi, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam bidang pendidikan.

b. Tujuan Manajemen Pendidikan

Secara umum tujuan utama manajemen pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian para pelajar agar sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional dan tingkat perkembangan atau perbaikan untuk usia pendidikan. Selain itu, manajemen pendidikan juga memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut: (1) terwujudnya suasana belajar dan proses belajar yang efektif, aktif, kreatif, bermakna, dan menyenangkan; (2) terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kontrol diri, kecerdasan, kepribadian yang baik, akhlak yang mulia, dan keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat; (3) untuk memenuhi satu dari lima kompetensi tenaga kependidikan; (4) agar tujuan pendidikan tercapai dengan efektif dan efisien; (5) citra positif pendidikan semakin meningkat; (6) meningkatkan mutu pendidikan; (7) terwujudnya perencanaan pendidikan yang

merata, bermutu, relevan, dan akuntabel; dan (8) tenaga pendidik mendapat bekal pengetahuan tentang proses dan tugas administrasi pendidikan

c. Fungsi-fungsi Manajemen dalam Pendidikan

Sebagai sebuah institusi pendidikan, sekolah dalam jenjang apapun dalam melakukan setiap program kegiatan selalu melalui tahapan-tahapan yang harus dijalani untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi manajemen pendidikan berfungsi sebagai langkah-langkah untuk meraih tujuan pendidikan. Fungsi manajemen ada empat hal yaitu *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* (Terry & Rue, 2010: 9-10). Dari keempat itu merupakan satu kesatuan proses yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu:

1) Perencanaan

Merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan yaitu merencanakan tujuan apa yang akan dicapai. Dalam perencanaan ada beberapa hal yang terdapat didalamnya yaitu: (a) menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Dalam pendidikan tujuan yang ingin dicapai tentunya ingin mencerdaskan anak bangsa yang berakhlak, beriman dan bertakwa, namun selain itu juga ada tujuan yang lain; (b) merumuskan tujuan, Setelah tujuan yang akan dicapai sudah jelas maka berikutnya adalah mengelompokkan tujuan tersebut menjadi tiga yaitu tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang; (c) mengidentifikasi peluang dan mengantisipasi segala hambatan; dan (d) menjabarkan perencanaan untuk mengatasi suatu masalah yang bisa saja terjadi.

2) Pengorganisasian

Dalam tahap ini yang lebih berperan adalah manajer atau kepala sekolah yang bertindak sebagai pimpinan suatu satuan pendidikan. Pengorganisasian adalah pengelompokan sumber daya manusia menjadi bagian-bagian kecil yang memiliki tugas yang berbeda-beda meski tugas tersebut saling berkaitan. Dalam proses ini ada tiga langkah yang harus dijalani yaitu: (a) merinci seluruh pekerjaan yang dibebankan harus sesuai keahlian; (b) pengembangan dari keahlian; dan (c) mekanisme kerja harus jelas agar terciptanya suatu sistem. Tujuannya untuk mentransformasikan strategi dan rencana ke dalam kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia dari organisasi, yaitu mengidentifikasi dan menggarisbawahi pekerjaan yang tepat, jenis yang tepat dan dengan demikian juga jumlah yang tepat dari pekerja (Rowley & Jackson, 2012: 186).

3) Pelaksanaan

Pada fungsi manajemen pendidikan ini kepala sekolah senantiasa harus selalu menggerakkan semua aspek yang sudah dikelompokkan agar dapat berjalan seperti yang sudah direncanakan. Penggerakan ini bisa berupa pemberian motivasi agar setiap bagian dapat bekerja lebih giat. Untuk itu bisa dengan pemberian kredit poin apabila melanggar peraturan, atau pemberian *reward*, hal ini bertujuan agar proses yang akan dicapai dapat terlaksana dengan baik.

4) Pengawasan

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif.

Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali (Handoko, 2016: 25). Hal yang tidak kalah penting adalah pengawasan ini adalah tugas dari pimpinan apakah semua sudah sesuai yang direncanakan, pengawasan sebagai fungsi manajemen pendidikan juga berfungsi sebagai penilaian kinerja dan sebagai penentu kebijakan dalam proses perencanaan selanjutnya. Fungsi-fungsi manajemen ini berjalan saling berinteraksi dan saling kait mengkait antara satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan proses manajemen. Dengan demikian, proses manajemen sebenarnya merupakan proses interaksi antara berbagai fungsi manajemen.

Dalam perspektif persekolahan, agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka proses manajemen pendidikan memiliki peranan yang amat vital. Karena bagaimana pun sekolah merupakan suatu sistem yang di dalamnya melibatkan berbagai komponen dan sejumlah kegiatan yang perlu dikelola secara baik dan tertib. Sekolah tanpa didukung proses manajemen yang baik, boleh jadi hanya akan menghasilkan kesemrawutan lajunya organisasi, yang pada gilirannya tujuan pendidikan pun tidak akan pernah tercapai secara semestinya.

Dengan demikian, setiap kegiatan pendidikan di sekolah harus memiliki perencanaan yang jelas dan realistik, pengorganisasian yang efektif dan efisien, penerangan dan pemotivasian seluruh personil sekolah untuk selalu dapat meningkatkan kualitas kerjanya, dan pengawasan secara berkelanjutan. Dari keempat fungsi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk meraih tujuan

pendidikan semua aspek harus berjalan sesuai prosedur yang jelas, semua harus bergerak sesuai yang sudah di rencanakan, dan semua harus bergerak sesuai apa yang sudah ditugaskan.

d. Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan

Substansi yang menjadi garapan manajemen pendidikan sebagai proses atau disebut juga fungsi manajemen adalah (a) perencanaan; (b) pengorganisasian; (c) pengarahan (motivasi, kepemimpinan, kekuasaan, pengambilan keputusan, komunikasi, koordinasi, negosiasi, manajemen konflik, perubahan, organisasi, keterampilan interpersonal, membangun kepercayaan, penilaian kinerja, dan kepuasan kerja); (d) Pengawasan meliputi pemantauan (*monitoring*), penilaian, dan pelaporan. Monitoring dan evaluasi sering disingkat ME atau Monev (Usman, 2013: 19).

Analisis tentang ruang lingkup tersebut menjadi lebih jelas dan mudah dipahami prosesnya apabila ditampilkan melalui kedua tabel berikut ini.

Tabel 1. Ruang Lingkup Fungsi Manajemen

Fungsi Sumber Daya	Perencanaan	Pengorganisasian	Pengarahan	Pengawasan
<i>Man</i>	✓	✓	✓	✓
<i>Money</i>	✓	✓	✓	✓
<i>Method/media</i>	✓	✓	✓	✓
<i>Material</i>	✓	✓	✓	✓
<i>Machines</i>	✓	✓	✓	✓
<i>Minutes</i>	✓	✓	✓	✓
<i>Information</i>	✓	✓	✓	✓

(Sumber, Husaini Usman (2013: 20))

Tabel 2. Ruang Lingkup Tugas Manajemen Pendidikan

Bidang Tugas	Peserta Didik	Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Keuangan	Sarana dan Parasarana	Humas	Layanan Khusus	Kurikulum dan Pembelajaran
Perencanaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pengorganisasian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pengarahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pengawasan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Sumber, Husaini Usman (2013: 20))

2. Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Penyelenggaraan kependidikan dan pengajaran khususnya pada SMK merupakan kegiatan manajemen melibatkan berbagai aspek di dalamnya dan juga luar sekolah. Selain itu, kegiatan kependidikan juga dipengaruhi oleh lingkungan internal serta lingkungan eksternal salah satunya pada pelaksanaan praktik. Kegiatan belajar mengajar di lingkungan lembaga pendidikan dan pengajaran dikelola dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada kerja sama dengan pihak industri sehingga akan didapat hasil didikan yang dapat diunggulkan dan sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Sesuai konsep pengembangan pendidikan kejuruan, yaitu menyiapkan lulusan yang memiliki keterampilan vokasional tertentu, maka kehadiran SMK justru semakin diperlukan.

Dalam menjalankan pelaksanaan manajemen di SMK harus berpegang pada prinsi-prinsip sebagai berikut:

- a. Normatif, pelaksanaan manajemen harus sejalan harus sejalan dengan norma yan berlaku.
- b. Profesional, manajemen harus direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis secara terprogram dan terukur dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Partisipatif, pengelolaan manajemen harus melibatkan semua unsur yang ada di sekolah secara terkai, terbuka, aktif, dan proporsional sehingga tidak didominasi oleh segelintir unsur saja.

- d. Transparan, pelaksanaan manajemen harus dapat terbuka bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem, baik yang berkenaan dengan program kebijakan dan kegiatan ataupun dalam hal pengelolaan keuangan (Depdiknas, 2005: 8)

Menurut Alma (2008: 235) menyatakan beberapa cara untuk meningkatkan jasa layanan yang ditawarkan oleh sebuah organisasi, yaitu mengangkat staf yang terampil, cekatan, bertanggungjawab dan akurat, meningkatkan kualitas jasanya, dan mengindustrialisasikan jasa dengan menambah beberapa peralatan yang mendukung proses pembelajaran. Komponen-komponen yang terdapat dalam *Total Quality Management* diantaranya: (1) dalam TQM harus ada perbaikan terus menerus (*continuous improvement*); (2) adanya perubahan kultur yang diaplikasikan tidak hanya bagaimana bisa mengubah perilaku staf, tetapi juga memerlukan perubahan dalam metode mengarahkan sebuah institusi; (3) adanya organisasi terbalik; (4) menjaga hubungan dengan pelanggan; (5) kolega sebagai pelanggan; (6) pemasaran internal; dan (7) profesionalisme dan fokus pelanggan (Edward Sallis, 2012: 73).

3. *Green school* (Sekolah Hijau)

Uraian tentang *green school* yang merupakan salah satu elemen penting dalam kajian teori tersebut. Pentingnya analisis *green school* tidak terlepas dari judul penelitian yang mengambil sebagai dasar dari pengembangan lingkungan sekolah. Dalam uraian tersebut unsur-unsur yang menjadi sorotan pada substansi pokok yaitu *green school* (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata) adalah sebagai berikut.

- a. Pengertian *Green school*

Pengertian *green school* dalam bahasa Indonesia adalah sekolah hijau, tetapi bukan hanya tampilan fisik sekolah yang hijau atau rindang, tetapi wujud sekolah yang memiliki program dan aktivitas pendidikan mengarah pada kesadaran dan kearifan terhadap lingkungan hidup. *Green school* yaitu sekolah yang memiliki komitmen dan secara sistematis mengembangkan program program tertentu untuk menginternalisasikan nilai nilai lingkungan kedalam seluruh aktifitas sekolah. Tampilan fisik sekolah ditata secara ekologis sehingga menjadi wahana pembelajaran bagi seluruh warga sekolah untuk bersikap arif dan berperilaku ramah lingkungan. *Green school* atau disebut dengan adiwiyata adalah salah satu program kementerian negara lingkungan hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup.

Green school atau adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita cita pembangunan berkelanjutan. Dalam program ini diharapkan semua warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif.

Green school dalam konsep adiwiyata melalui modul terbaru 2012 adalah sekolah yang mampu mengoptimalkan potensi sumberdaya alam sebagai solusi pemecahan permasalahan yang di hadapi oleh warga seputar sekolah. Adapun komponen komponen lain menjadi pelengkap yang di sesuaikan oleh kondisi lingkungan sekolah. *Green school* memiliki sasaran untuk seluruh warga sekolah.

Dengan maksud untuk membangun serta menggali partisipasi warga sekolah dalam kegiatan-kegiatan yang memiliki muatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Dalam implementasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup, baik melalui pendidikan formal, non formal maupun informal diharapkan agar semua pihak dapat melakukan antara lain: (1) Mengembangkan kelembagaan pendidikan lingkungan hidup; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia; (3) Pengembangan sarana dan prasarana; (4) Peningkatan dan efisiensi penggunaan anggaran; (5) Pengembangan materi lingkungan hidup; (6) Peningkatan komunikasi dan Informasi; (7) Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan; dan (8) Pengembangan metode pendidikan lingkungan hidup.

Kedelapan aspek tersebut perlu ditumbuh kembangkan sehingga dapat menjadi alat penggerak yang efisien dan efektif bagi kemajuan pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup adalah upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Panduan Adiwiyata bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang ada pada akhirnya dapat menggerakkan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Selanjutnya, agar program *green school* ini dapat berjalan dengan sah sambil menyikapi perkembangan lingkungan hidup serta pengembangan metode pendidikan lingkungan hidup dan untuk meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman mengenai wawasan lingkungan hidup kepada peserta didik dan masyarakat pada tanggal 2 juni 2005 telah ditanda tangani kesepakatan bersama antara menteri negara lingkungan hidup dan menteri pendidikan nasional dan sebagai realisasi dari MOU tersebut pada tanggal 21 Februari 2006 telah dirancang *green school* atau yang dikenal dengan sekolah adiwiyata yaitu sekolah peduli dan berbudaya lingkungan.

b. Indikator dan Kriteria *Green school*

Dalam mewujudkan program *green school* telah ditetapkan berbagai indikator: (1) pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan; (2) pengembangan kurikulum berbasis lingkungan; (3) pengembangan kegiatan berbasis partisipatif; (4) pengembangan dan pengelolaan sarana pendukung sekolah. Indikator *green school* dijabarkan dalam beberapa kriteria sebagai berikut.

1) Pengembangan Kebijakan Sekolah

Pengembangan kebijakan sekolah adalah aspek yang penting dalam rangka mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Oleh karena itu kebijakan sekolah perlu mendapat prioritas utama untuk dikembangkan diseluruh tingkatan pendidikan formal mulai dari pendidikan SD dan pendidikan menengah (SMP, SMA dan SMK) atau yang sederajat. Dengan kebijakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan diharapkan semua program dan kegiatan sekolah yang terkait dengan masalah lingkungan hidup dapat terakomodir dengan baik. Kebijakan ini menjadi dasar pengelolaan program dan kegiatan di sekolah yang berbasis lingkungan hidup. Pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan tersebut adalah: (a) Visi dan misi sekolah yang peduli dan berbudaya

lingkungan (b) Kebijakan sekolah dalam mengintegrasikan pelajaran lingkungan hidup pada semua mata pelajaran (c) Kebijakan peningkatan sumber daya manusia (d) Kebijakan sekolah yang mendukung lingkungan sekolah 5) Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan hidup.

2) Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan

Penyampaian materi lingkungan hidup kepada siswa dapat dilakukan melalui kurikulum secara terintegrasi atau monolitik. Tema lingkungan hidup diharapkan menjadi kerangka utama dalam pengembangan dan penyusunan kurikulum berbasis lingkungan hidup. Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan hidup untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan dapat dicapai melalui hal hal berikut: (a) pengembangan model pembelajaran lintas mata pelajaran; (b) pengendalian dan pengembangan materi serta persoalan lingkungan hidup yang ada di masyarakat sekitar; (c) pengembangan metode belajar berbasis lingkungan dan budaya; dan (d) pengembangan kegiatan ekstrakurikuler untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang lingkungan hidup.

3) Pengembangan Kegiatan Berbasis Partisipatif

Untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, warga sekolah perlu dilibatkan dalam berbagai aktifitas lingkungan hidup. Selain itu sekolah juga diharapkan melibatkan masyarakat disekitarnya dalam melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi warga sekolah, masyarakat dan lingkungannya. Menurut Somwaru, L (2016), keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa anak-anak belajar untuk bekerjasama dalam kelompok dan dengan

demikian bersosialisasi, kreativitas mereka juga dirangsang dan mereka mendapatkan pengetahuan praktis.

Pengertian partisipatif adalah adanya keikutsertaan siswa secara sukarela atau pelibatan pihak lain dalam kegiatan yang terkait dengan lingkungan hidup. Kegiatan yang dilakukan oleh warga sekolah dalam pengembangan kegiatan bersifat partisipatif adalah: (a) menciptakan kegiatan ekstrakurikuler di bidang lingkungan hidup bersifat partisipatif di sekolah; (b) mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup oleh pihak luar; dan (c) membangun dan diprakarsai kegiatan kemitraan dalam pengembangan lingkungan hidup di sekolah.

4) Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah

Pengembangan *green school* perlu didukung sarana prasarana yang mencerminkan upaya pengelolaan lingkungan hidup. Selain pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran, warga sekolah juga didorong untuk mengembangkan upaya untuk meningkatkan pengelolaan dan kualitas lingkungan hidup baik didalam maupun diluar sekolah. Kegiatan pembelajaran tidak lagi sekedar penggalan pengetahuan tetapi sekaligus mencari media untuk upaya penyelamatan lingkungan.

Menurut Jasmi, N.F & Kamis, A (2019), teknologi hijau dapat dilihat sebagai salah satu unsur yang dapat meminimalkan degradasi kualitas lingkungan dan menyediakan lingkungan yang sehat. Selain itu, teknologi hijau juga penting untuk diterapkan di bidang pendidikan untuk menanamkan minat siswa dalam mengapresiasi lingkungan. Siswa juga dapat mempraktekkan ilmu yang dipelajari dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Untuk itu sistem pendukung atau sarana prasarana sekolah yang ramah lingkungan menjadi syarat tambahan bagi *green school*. Proses pemilihan perancangan dan perawatan fasilitas sekolah didasarkan pada prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Pengembangan dan pengelolaan sarana tersebut meliputi: (a) pengembangan fungsi sarana pendukung sekolah yang ada untuk pendidikan lingkungan hidup; (b) peningkatan kualitas lingkungan hidup didalam dan diluar kawasan sekolah; (c) penghematan sumber daya alam (alam, listrik, air); (d) peningkatan kualitas pelayanan makanan sehat; dan (d) pengembangan sistem pengelolaan sampah.

Berujuk kepada analisis keempat indikator tersebut dapat ditegaskan bahwa dalam merealisasikan suatu program sekolah hijau atau Adiwiyata di sekolah jika tidak ada indikasi bahwa ada program: (1) pengembangan kebijakan sekolah; (2) pengembangan kurikulum berbasis lingkungan; (3) pengembangan kegiatan berbasis partisipatif; dan (4) pengembangan dan pengelolaan sarana pendukung sekolah, yang dilaksanakan secara efektif dan efisien maka terjadi kemandulan lingkungan hijau di sekolah tersebut, seperti yang terjadi di SMKN 2 Depok Sleman sekarang ini.

c. Norma Dasar *Green School*

Kepala sekolah mengajak warga sekolah melaksanakan proses belajar materi lingkungan hidup dan turut berpartisipasi dalam melestarikan serta menjaga lingkungan hidup di sekolah dan sekitarnya. Program dan kegiatan yang dikembangkan tersebut harus berdasarkan norma-norma dasar dan berkehidupan

yang meliputi antara lain: Kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

d. Prinsip Prinsip Dasar *Green School*

Pelaksanaan *green school* diletakkan pada dua prinsip dasar berikut ini: (1) partisipatif: Komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggungjawab dan peran; dan (2) berkelanjutan: Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif.

Selanjutnya untuk memahami *green school*, setidaknya kita harus mengetahui prinsip-prinsip dalam *green school* yang masing-masing elemennya diuraikan sebagai berikut.

1) Nilai Dasar

Konsep dan kegiatan yang dikembangkan bertumpu pada nilai-nilai luhur kehidupan seperti kemanusiaan, kesetiakawanan, kejujuran, keadilan, dan keseimbangan alam.

2) Prinsip Dasar

Prinsip dasar *green school* terdiri dari tiga aspek, pertama partisipatif, semua warga sekolah dan masyarakat berhak memperoleh informasi yang memadai dan terlibat dalam keseluruhan proses (perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan kontrol) sesuai tanggungjawab dan perannya. Kedua, berkelanjutan, seluruh kegiatan memiliki manfaat dalam jangka panjang. Dan, ketiga, menyeluruh. Seluruh warga sekolah selalu mempertimbangkan seluas-luasnya aspek kehidupan

dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sehingga dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi lingkungan.

3) Wujud

Green school “Sekolah Hijau” setidaknya harus memenuhi persyaratan (1) memiliki kurikulum yang berwawasan lingkungan; (2) mempunyai rancang bangun, penggunaan bahan dan pemeliharaan prasarana dan sarana berdasarkan prinsip ramah lingkungan; (3) memiliki manajemen sekolah yang berwawasan lingkungan; (4) program sekolah didukung oleh komunitas di luar sekolah; (5) warga sekolah memiliki perilaku peduli lingkungan.

4) Program

Terdapat 5 (lima) bentuk program sekolah hijau yaitu (1) pengembangan kurikulum berwawasan lingkungan; (2) peningkatan kualitas kawasan sekolah dan lingkungan sekitarnya. Ini merupakan bagian dari upaya mendorong warga sekolah dan komunitas sekitar untuk secara aktif melakukan upaya meningkatkan kualitas lingkungan; (3) pengembangan pendidikan berbasis komunitas. Sekolah tidak terlepas dari kehidupan nyata sehingga sekolah dan komunitas merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan; (5) pengembangan sistem pendukung yang ramah lingkungan, seperti penghematan air, pengembangan sistem sanitasi dan pengelolaan sampah; dan (6) pengembangan manajemen sekolah berwawasan lingkungan. Manajemen sekolah diharapkan dapat membangun filosofi dan budaya sekolah yang berwawasan lingkungan dan ditunjang oleh sumber daya manusia yang mumpuni.

5) Manfaat

Beragam manfaat yang diharapkan dari *green school* di antaranya (1) warga sekolah memiliki pemahaman terpadu mengenai lingkungan hidup; (2) sekolah menjadi tempat belajar warga sekolah mengenai lingkungan secara menarik dan mudah; (3) metode pembelajaran menjadi lebih dinamis; (4) potensi diri siswa, kapasitas guru dan staf dalam aspek lingkungan meningkat; (5) sekolah memiliki jaringan yang luas dan didukung oleh komunitas di luar sekolah.

e. Tujuan dan Mamfaat Penerapan *Green school*

Adapun tujuan dari *green school* adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik. Secara garis besar konsep pembelajaran yang menggunakan lingkungan memiliki kelebihan yaitu: (1) peserta didik dibawa langsung ke dunia konkrit tentang penanaman konsep pembelajaran, sehingga peserta didik tidak hanya bisa menghayalkan materi; (2) lingkungan dapat digunakan setiap saat, kapanpun, dimanapun, sehingga tersedia setiap saat, tetapi tergantung dari jenis materi yang sedang diajarkan; (3) konsep pembelajaran lingkungan tidak membutuhkan biaya karena semuanya telah disediakan oleh alam lingkungan; (4) mudah dicerna oleh peserta didik, karena peserta didik disuguhkan materi yang sifatnya konkrit bukan abstrak; (5) suasana yang nyaman memungkinkan peserta didik tidak mengalami kejenuhan ketika meneriam materi; dan (6) memberi peluang untuk untuk berimajinasi.

Dari analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsep pembelajaran menggunakan lingkungan memberikan peluang yang sangat besar bagi peserta didik, untuk meningkatkan hasil belajarnya. Oleh karena itu guru mesti mampu

menyadarkan para siswa bahwa ekosistem lingkungan sangat mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia (Hamzah dan Nurdin, 2012: 146-147). Misalnya guru menyadarkan siswa bahwa maraknya bencana yang terjadi di Indonesia seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, wabah penyakit, merupakan kesalahan manusia dalam menjaga dan melindungi fungsi ekosistem. Pencemaran tersebut terjadi karena manusia tidak menjaga ekosistem lingkungan misalnya membuang sampah di sungai, menebangi pohon secara sembarangan serta melakukan pencemaran udara, baik sengaja maupun tidak.

f. Pentingnya Penerapan *Green school*

Kelancaran kegiatan belajar mengajar serta kelas yang kondusif dapat tercipta juga dengan tanaman dan tumbuh tumbuhan. Untuk pentingnya penerapan *Green Shool* untuk dapat: (1) membantu menyediakan oksigen yang dapat meningkatkan kinerja otak sehingga peserta didik dapat menerima pelajaran dengan baik; dan (2) menciptakan lingkungan sekolah yang rindang, teduh dan nyaman sehingga kegiatan belajar mengajar dapat tercapai; sebaliknya, jika tidak ada *green shool* maka akan menyebabkan: (1) suasana kelas dan sekolah menjadi panas, para guru dan peserta didikpun menjadi tidak nyaman melaksanakan belajar mengajar dikelas; (2) kegiatan belajar mengajar di kelaspun akan terganggu, peserta didikpun susah untuk berkonsentrasi belajar karena suasana kelas menjadi sesak dan pengap; (3) okigen yang sangat terbatas tersebut harus dibagi bagikan dengan puluhan peserta didik yang sedang belajar di dalam kelas, bahkan ratusan peserta didik dalam satu sekolah sehingga menimbulkan peningkatan kadar karbon dioksida; (4) kerja otak juga sangat terganggu diakibatkan dengan minimnya aliran darah yang

mengandung oksigen segar ke dalam otak.; dan (5) peserta didik menjadi kurang mampu untuk berkonsentrasi dalam belajar, gurupun menjadi mudah marah dan menjadi kurang fokus dalam menyampaikan materi pelajaran.

Berdasarkan uraian tentang pentingnya pelaksanaan *green school* tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi dan peran tumbuh-tumbuhan dalam kegiatan belajar mengajar sangat penting bagi kelancaran serta kebersihan kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Itulah sebabnya pengaturan tanaman dan tumbuh tumbuhan di lingkungan kelas harus direncanakan dan direalisasikan sedemikian rupa agar suasana kegiatan belajar mengajar di dalam kelas berlangsung dengan kondusif. *Green school* sangat penting untuk digalakkan demi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar yang sehat (Vera, 2010: 99-100). Selain membawa kemanfaatan bagi stakeholder pendidikan, program tersebut juga akan membantu mengurangi dampak pemanasan global meskipun dalam skala yang relatif kecil.

g. Peran Kepala Sekolah dalam Mewujudkan *Green school*

Tingkat kerusakan lingkungan hidup semakin hari semakin parah serta mengancam kehidupan manusia pembukaan lahan baru mengakibatkan (Wiyani, 2013: 152-153), banyaknya hutan yang dirusak karena umumnya pembukaan lahan tersebut tidak mengikuti kaedah ekologi. Untuk itu perlu menciptakan manusia yang ramah lingkungan, diperlukan peran pendidikan khususnya sekolah, sebab disekolah banyak sekali generasi muda yang akan menjadi pewaris negeri ini yang akan ditempa kesadarannya untuk mencintai lingkungan. Salah satunya yaitu dengan menciptakan sekolah ramah lingkungan melalui gerakan *green school*.

Dalam hal ini, fungsi kepala sekolah memegang peranan penting yang bertanggung jawab penuh terhadap pengaturan dan pengelolaan jalannya roda pendidikan.

Dalam mengimplementasikan terwujudnya *green school*, peran yang dilakukan kepala sekolah mengacu pada (Kementrian Negara Lingkungan Hidup tahun 2009 dan 2012 tentang Panduan Adiwiyata: Wujudkan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan) yaitu dengan mengarahkan semua pihak untuk dapat melakukan pendekatan pembelajaran pendidikan Lingkungan. Adapun penjabarannya, peran kepala sekolah dalam mewujudkan *green school* sebagai berikut:

- 1) Kepala sekolah sebagai perencana mewujudkan *green school*, melalui rencana yang strategis. Agar segala sesuatu yang direncanakan memiliki tujuan. Termasuk dalam perencanaan *green school*, agar tujuan dan maamfaat *green school* dapat dirasakan semua warga sekolah.
- 2) Kepala sekolah sebagai pengkoordinir harus menyusun dengan baik struktur organisasi sekolah dan struktur dalam pelaksanaan *green school*. Agar kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.
- 3) Kepala Sekolah sebagai motivator harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat di tumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar.

4) Kepala Sekolah sebagai inovator harus mempunyai rencana yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan sekolah. Kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara dia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, pragmatis dan keteladanan.

h. Dimensi-dimensi *Green school*

Majumdar (2011) mengusulkan lima dimensi dalam pengembangan sekolah kejuruan yang berbasis lingkungan hidup (*greening*) sebagaimana Gambar 2.



Gambar 1. Lima Dimensi Pengembangan *Green Vocational School*

Dimensi pertama yaitu *Green Campus*, dimensi ini dikembangkan berdasarkan pengelolaan sumber daya sekolah atau kampus seperti air, limbah, polutan, dan sebagainya. Dimensi kedua yaitu dimensi *green curriculum* yang berkaitan dengan program atau kebijakan yang berkaitan dengan pekerjaan hijau yang memperhatikan kondisi lingkungan sekitar baik dari segi teknologi maupun rancangan kurikulum yang mengarahkan peserta didik untuk memiliki karakter yang baik dan peduli lingkungan. Dimensi ketiga yaitu *green community* yang berkaitan dengan pembentukan komunitas hijau yang diintegrasikan dengan

ekstrakurikuler atau program lainnya. Dimensi keempat yaitu *green research* yang berkaitan dengan pengembangan budaya penelitian relevan dan sarana pendukung lainnya untuk pembangunan sekolah hijau yang berkelanjutan. Kelima yaitu *green culture* berkaitan dengan program-program untuk penguatan pendidikan nilai, etika, sikap, dan perilaku yang menghormati sumber daya ekologis dan nilai-nilai kebutuhan masa depan generasi mendatang. Rancangan tersebut dipandang mampu menghasilkan suatu sistem pendidikan yang berbasis lingkungan hidup sehingga mampu mencetak lulusan yang peduli terhadap lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata pasal 2 menyebutkan Komponen Program Adiwiyata, meliputi (1) aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan meliputi visi misi dan tujuan sekolah, arah pengembangan kebijakan dan struktur kurikulum pendidikan; (2) aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan meliputi tenaga pendidik yang mengimplementasikan strategi belajar mengajar dan kegiatan peserta didik berbasis lingkungan; (3) aspek kegiatan sekolah berbasis partisipatif meliputi kegiatan dan pengelolaan sekolah berbasis lingkungan dan menjalin kemitraan dengan pihak terkait; dan (4) aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan meliputi ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan, dan peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana tersebut. Pendidikan kejuruan merupakan salah satu jenjang pendidikan menengah selayaknya mengembangkan prinsip *greening* tersebut dalam pengembangan sekolah yang berkelanjutan.

4. Upaya-upaya mengembangkan PLH di Lingkungan SMKN 2 Depok

Pendidikan Lingkungan Hidup memiliki tujuan yaitu: meningkatkan kesadaran yang berhubungan dengan saling ketergantungan ekonomi, sosial, politik, dan ekologi antara daerah perkotaan dan pedesaan; memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, sikap tanggung jawab, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan, menciptakan pola baru perilaku individu, kelompok dan masyarakat secara menyeluruh menuju lingkungan yang sehat, serasi dan seimbang. Tujuan pendidikan lingkungan tersebut dapat dijabarkan menjadi enam kelompok, yaitu:

- 1) Kesadaran, yaitu memberi dorongan kepada setiap individu untuk memperoleh kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan dan masalahnya.
- 2) Pengetahuan, yaitu membantu setiap individu untuk memperoleh berbagai pengalaman dan pemahaman dasar tentang lingkungan dan masalahnya.
- 3) Sikap, yaitu membantu setiap individu untuk memperoleh seperangkat nilai dan kemampuan mendapatkan pilihan yang tepat, serta mengembangkan perasaan yang peka terhadap lingkungan dan memberikan motivasi untuk berperan serta secara aktif di dalam peningkatan dan perlindungan lingkungan.
- 4) Keterampilan, yaitu membantu setiap individu untuk memperoleh keterampilan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah lingkungan.
- 5) Partisipasi, yaitu memberikan motivasi kepada setiap individu untuk berperan serta secara aktif dalam pemecahan masalah lingkungan.

- 6) Evaluasi, yaitu mendorong setiap individu agar memiliki kemampuan mengevaluasi pengetahuan lingkungan ditinjau dari segi ekologi, sosial, ekonomi, politik, dan faktor-faktor pendidikan.

Berdasarkan tujuan di atas, tersirat bahwa masalah lingkungan hidup terutama berkaitan dengan manusia, bukan hanya lingkungan. Dalam konteks Indonesia, pendidikan lingkungan menjadi komponen penting dari strategi pengelolaan lingkungan Indonesia, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah menetapkan tujuan pendidikan lingkungan Indonesia, sebagai berikut: (1) untuk mengembangkan sikap lingkungan yang positif antara siswa; (2) untuk memberikan pengetahuan dasar, keterampilan, dan motivasi untuk berpartisipasi dalam resolusi, dan antisipasi masalah lingkungan dan (3) membuat sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup (Haris & Afdaliah, 2016: 314).

Kegagalan PLH yang lalu karena lembaga pendidikan formal terlalu menekankan kepada pencapaian individu untuk bersaing menjadi yang terbaik untuk mendapatkan penghargaan. Selain itu sistem pendidikan yang ada tidak memberi kontribusi untuk penggunaan keterampilan yang semestinya. Jika tujuan PLH ditekankan kepada perubahan sikap maka langkah pembelajaran yang dapat ditempuh adalah dengan menghadapkan siswa kepada permasalahan lingkungan yang ada. Karena pasar tenaga kerja akan dipengaruhi oleh ekonomi hijau.

Menurut Mustapha (2015), beberapa pekerjaan akan diganti dalam proses pergeseran dari bahan bakar fosil ke tenaga surya dari pembakaran sampah ke daur ulang, beberapa pekerjaan akan hilang tanpa pengganti, ketika produksi produk

tertentu dilarang oleh peraturan, pekerjaan tambahan akan dibuat, misalnya, dalam pembuatan produk baru atau penawaran layanan baru dan sejumlah pekerjaan yang ada akan diubah dengan kompetensi baru, seperti dari tukang pipa, listrik dan logam. Perusahaan akan mengadopsi langkah-langkah penghijauan atau membangun bangunan baru dengan peralatan hemat energi. Dengan demikian, ekonomi penghijauan akan membutuhkan pelatihan baru dan pelatihan ulang tenaga kerja untuk mengadopsi proses produksi baru.

Guru PLH khususnya dan bahkan semua guru memiliki peran penting di dalam menyukseskan program PLH, membangun gaya hidup dan menanamkan prinsip keberlanjutan dan menerapkan etika lingkungan. Menurut Warju (2017), siswa tidak hanya diajarkan untuk menguasai semua mata pelajaran dan kompetensi keahlian tertentu, tetapi juga siswa diajarkan pendidikan lingkungan sehingga mereka memiliki rasa kesadaran, motivasi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku ramah lingkungan dalam bentuk dari tindakan nyata untuk mencapai paradigma pembangunan berkelanjutan. Kedua, terutama untuk sekolah menengah kejuruan (SMK), mereka juga dilengkapi dengan keterampilan untuk membuat teknologi tepat guna dalam bentuk teknologi ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses pembelajarannya, PLH jangan dijadikan sebagai topik hafalan tetapi harus dikaitkan dengan dunia nyata yang dihadapinya sehari-hari (kontekstual) dan dunia nyata ini harus dijadikan obyek kajian dalam konsep PLH. Obyek kajian PLH ada di lingkungan sekitar sekolah. Setiap sekolah memiliki lingkungan yang berbeda sehingga akan semakin menarik karena keragamannya.

Walaupun obyek kajiannya berbeda namun tujuan pembelajarannya tetap sama. Pendidikan Lingkungan Hidup dapat diajarkan dengan menerapkan pendekatan kontekstual. Penerapan pendekatan kontekstual (CTL) dalam kelas langkahnya adalah sebagai berikut (Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional):

- a. Mengembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilannya.
- b. Melaksanakan kegiatan inkuiri (dengan siklus observasi, bertanya, berhipotesis, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan).
- c. Mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya.
- d. Menciptakan masyarakat belajar (belajar dalam kelompok, kelompok kecil, kelompok kelas sederajat atau mendatangkan ahli).
- e. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran (guru berperan sebagai model dalam melakukan sesuatu, misal pembibitan tanaman, pendaur ulangan, dsb)
- f. Lakukan refleksi di akhir pertemuan (misal pernyataan langsung tentang yang diperoleh pada pembelajaran, catatan atau jurnal di buku siswa, kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran, diskusi atau hasil karya).
- g. Lakukan penilaian yang sebenarnya (*authentic assessment*) seperti menilai kegiatan dan laporan, PR, kuis, karya siswa, laporan, jurnal, hasil tes, dan karya tulis).

Berujuk kepada uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa PLH dapat diajarkan melalui berbagai cara seperti observasi, diskusi, kegiatan atau praktik

lapangan, praktik laboratorium, laporan kerja praktik, seminar, debat, kerja proyek, magang dan kegiatan petualangan. Tempat yang dapat dijadikan obyek kajian sangat bervariasi: lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, lingkungan perkotaan, pasar, terminal, selokan, sungai, sawah, taman kota, lapangan udara, pembangkit tenaga atom, danau, instalasi pengolahan air minum, pengolahan sampah, pipa buangan rumah tangga, tempat pembuangan sampah dan lingkungan lain di sekitar atau dekat sekolah. Masalah yang dapat diangkat jadi topik pembelajaranpun sangat beragam mulai dari masalah sampah rumah tangga, sampah industri, penggunaan deterjen, pestisida, pupuk buatan, aerosol dan sprai, pencemaran tanah, air, udara, kekurangan air, banjir, penurunan air tanah, penggundulan hutan, hutan dan taman kota, bahkan *illegal logging*.

Menurut Iwan & Rao (2017), menyediakan lingkungan yang sehat bagi anak-anak melalui membangun bangunan ramah lingkungan akan memiliki manfaat jangka panjang, mengingat fakta bahwa tubuh fisik anak-anak lebih rentan daripada orang dewasa. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat digarisbawahi bahwa jika konsep atau materi ajar PLH diajarkan dengan cara tersebut di atas yaitu dengan melibatkan siswa secara aktif (bukan hanya mengisi LKS tetapi aktif secara mental) maka diharapkan terbentuk siswa yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang peduli terhadap masalah lingkungan dan mampu berperan aktif dalam memecahkan masalah lingkungan, memiliki kemampuan menerapkan prinsip keberlanjutan dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-harinya.

5. Kriteria Sekolah Berbudaya Lingkungan

Terdapat beberapa aspek penting yang harus terpenuhi guna mewujudkan sekolah yang memiliki kondisi berbudaya lingkungan, yaitu:

- a. Lokasi sekolah mudah dijangkau, aman, tidak terlalu dekat dengan pusat keramaian, jalan raya, maupun tempat pembuangan sampah. Sekolah berdiri diatas tanah yang stabil dan memiliki lahan yang cukup luas.
- b. Sekolah memiliki cukup lahan (*space*) sebagai sabuk hijau (*green belt*) sekolah, cukup tempat belajar, olah raga, bermain, maupun istirahat.
- c. Tercukupinya ruang-ruang kelas maupun ruang pendukung sekolah yang lain. Ruang-ruang tersebut diusahakan memiliki sirkulasi udara yang baik serta ”sehat” untuk kegiatan sekolah.
- d. Sekolah memiliki sarana kebersihan dan kesehatan yang sebanding dengan jumlah warga sekolah, baik siswa, guru, maupun seluruh staf pegawai sekolah. Memiliki sistem drainase yang baik serta tempat pembuangan limbah cair maupun padat yang aman.
- e. Terdapat tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman keras disekitar lingkungan sekolah, sehingga terkesan asri dan mendukung kesehatan seluruh kompleks sekolah.

6. Langkah-langkah mewujudkan Sekolah Berbudaya Lingkungan

Beberapa langkah yang dapat di realisasikan untuk mewujudkan Sekolah Berbudaya Lingkungan antara lain:

- a. Penataan lingkungan fisik sekolah yang mengarah pada keseimbangan ruang (*space*). Dilengkapi dengan *green belt* tanaman dan pepohonan disekitar ruang

- kelas, sehingga 7 dapat tercipta lingkungan asri, sirkulasi udara bersih dan sehat, serta terpenuhinya pasokan oksigen untuk warga sekolah. Rencana ini merupakan perencanaan awal (*masterplan*) yang mengarah pada terciptanya lingkungan sekolah yang asri dan sehat sebagai sebuah lingkungan pendidikan.
- b. Perencanaan tindakan (*action plan*). Untuk menggerakkan semua elemen sekolah agar bersama-sama bertanggung jawab terhadap kebersihan, kelesatarian, maupun pemeliharaan lingkungan.
 - c. Upaya pemanfaatan lebih lanjut lingkungan sekolah sebagai media praktikum beberapa mata pelajaran yang diberikan guru disekolah, seperti untuk mata pelajaran geografi, biologi, fisika, pendidikan jasmani kesehatan, maupun mata pelajaran lainnya.
 - d. Lebih jauh lagi, hal ini dapat sebagai upaya pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif khususnya untuk kepentingan sekolah tersebut.

7. Manfaat Sekolah Berbudaya Lingkungan

Terdapat banyak manfaat yang dapat diperoleh dari sekolah yang berbudaya lingkungan, antara lain:

- a. Terwujudnya lingkungan yang bersih, asri, nyaman, dan menyenangkan, sehingga dapat mendukung proses kegiatan belajar mengajar disekolah.
- b. Tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab dikalangan warga sekolah dalam pemanfaatan serta pemeliharaan lingkungan, baik siswa, guru, kepala sekolah, dan semua staf pegawai dan karyawan sekolah.

- c. Sekolah dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang terintegrasi sebagai suatu habitat ilmiah. Ini akan mengikis paradigma lama, dimana sekolah hanya difokuskan pada bangunan fisik saja.
- d. Lingkungan sekolah dapat menjadi laboratorium alam (*outdoor lab*), sehingga dapat memperluas wawasan keilmuan.

Semua manfaat tersebut dapat maksimal jika didukung oleh program sekolah yang focus dan konsisten untuk dapat melaksanakan langkah-langkah yang mengarah pada terbentuknya Sekolah Berbudaya Lingkungan. Selain usaha-usaha tersebut diatas, yang tidak kalah penting adalah dukungan dari pemerintah melalui dinas-dinas terkait untuk memberikan langkah nyata dalam pemberdayaan sekolah yang berbudaya lingkungan. Langkah-langkah terdekat yang dapat dilaksanakan diantaranya: pemberian ekstra Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH), program jumat bersih, pengadaan dan pengoptimalan kebun sekolah, maupun program wajib tanam pohon bagi siswa. Keseluruhan itu diharapkan akan semakin mempercepat proses menuju sekolah yang berbudaya lingkungan.

8. Kurikulum 2013 Dan Masa Depan PLH

Ikhtisar tentang implementasi Kurikulum 2013, bahwa perlunya perubahan ekstrim dalam membangun pendidikan sehingga tercapai kesesuaian lulusan sesuai kebutuhan pembangunan manusia pada era Bonus Demografi 2020-2030. Untuk itu penerapan Kurikulum 2013 yang didasarkan beberapa prinsip utama, yaitu: (1) standar kompetensi lulusan yang dilandasi oleh tingkat kebutuhan; (2) standar isi dilandasi kompetensi inti yang bebas mata pelajaran; (3) semua mata pelajaran berorientasi pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan; (4) mata pelajaran

diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai; (5) semua mata pelajaran diikat dalam kompetensi inti; dan (6) keselaraan kompetensi lulusan, isi, proses, dan penilaian konsekuensi logis pada tahap ini adalah merubah paradigma seluruh stakeholder dalam kaitan kependidikan yang bertumpu pada kualitas lulusan untuk bersaing dengan bangsabangsa lain.

Analisis tersebut memberi kesan bahwa implementasi kurikulum 13 terkesan dipaksakan, terburu-buru, dan ketidaksiapan seluruh stakeholder, termasuk struktur birokrasi pendidikan, struktur sekolah, dan bahkan pada struktur sosialnya. Hal ini tentunya berdampak pada hilangnya salah satu wujud mata pelajaran yang selama ini menjadi sumber inspirasi dalam model pembelajaran dan manajemen sekolah yaitu Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). Selama ini mata pelajaran PLH dikenal sebagai mata pelajaran yang mampu menggerakkan seluruh warga sekolah untuk mengabdikan pada alam lingkungan sekolah, menjalin ikatan sosial antar warga sekolah, dan membangun inisiatif untuk menjadi visi sekolah.

Oleh sebab itu hampir sebagian besar memiliki visi yang berorientasi pada kepedulian lingkungan sebagai pondasi untuk membangun anak bangsa sesuai dengan kompetensi lulusan pada kurikulum 2013. Lebih dari itu hilangnya wujud PLH berdampak pada hilangnya status guru PLH. Selama ini status guru PLH bukanlah status guru pelengkap, melainkan kualitas guru PLH ditentukan oleh pendidikan khusus dengan tingkat profesionalitas yang tinggi pada bidangnya melalui kegiatan pelatihan-pelatihan yang periodik. Bahkan tidak sedikit guru PLH harus mengikuti program PLPG lagi untuk melebur pada mata pelajaran lain. Kondisi inilah yang mengakibatkan pola pengembangan manajemen sekolah

berwawasan lingkungan melalui sekolah Adiwiyata atau Sekolah Berbudaya Lingkungan tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya selama implementasi Kurikulum 2013.

Keadaan ini juga ditandai oleh sikap Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk mengambil kebijakan yang tidak kondusif, antara lain pengembangan karir guru untuk melanjutkan Studi magister dalam bidang PLH tidak diakui sebagai wujud pengembangan profesionalitas guru yang bersangkutan. Perlu diakui bahwa berdasarkan penetapan untuk menghentikan penerapan Implementasi 2013 merupakan angin segar bagi upaya membuka kembali peluang penerapan mata pelajaran PLH dan juga pengembangan karir guru PLH.

Penutupan Pendidikan Lingkungan Hidup perlu mendapatkan perhatian, dukungan dari semua pihak, kesungguhan pemerintah dan guru agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu membangun masyarakat yang peduli lingkungan dan mampu berperan aktif dalam memecahkan masalah lingkungan. Di dalam proses pembelajaran PLH, siswa harus dilibatkan secara aktif (terlibat proses mentalnya) dalam mengonstruksi pengetahuan, sikap dan keterampilannya. Filosofi yang harus digunakan dalam pembelajaran adalah konstruktivis dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah (PBL), pembelajaran kontekstual (CTL), inkuiri, dan klarifikasi nilai. Penekanan pembelajaran bukan pada penguasaan konsep tetapi pengubahan sikap dan pola pikir siswa agar lebih peduli terhadap masalah lingkungan, mampu menerapkan prinsip keberlanjutan dan etika lingkungan.

Dengan cara-cara ini diharapkan siswa mendapatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan secara lebih bermakna, mampu menerapkan dalam kehidupan

sehari-hari dan menularkan kepada lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Melalui cara ini akan terbentuk masyarakat yang memiliki sikap positif, peduli terhadap lingkungan dan mampu berperan aktif dalam memecahkan masalah lingkungan serta mampu menerapkan prinsip keberlanjutan dan etika lingkungan dalam kehidupannya. Secara kelembagaan, setelah adanya perubahan kabinet, yaitu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, diperlukan suatu terobosan untuk men-sinergis-kan kembali pola pendidikan lingkungan hidup yang terintegrasi dengan wilayah kewenangan masing-masing kementerian tersebut.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan terhadap penelitian ini ditunjukkan oleh Darmastuti (2014) dalam jurnalnya yang berjudul “Manajemen Sarana dan Prasarana Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pada Jurusan Teknik Komputer dan Informatika Di SMK Negeri 2 Surabaya”. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, Vol.3 No.3, Januari 2014. Hlm. 9-20. Dalam proses pembelajaran sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran proses kegiatannya, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana sangat diperlukan oleh setiap sekolah. Sarana dan Prasarana yang dimaksud adalah: (1) pengadaan dan perencanaan sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran, (2) pendistribusian sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran, (3) penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran, (4) inventarisasi sarana dan prasarana dalam

upaya peningkatan kualitas pembelajaran, (5) penghapusan sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran (6) usaha-usaha yang dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran.

Selain itu, Setiawaty (2011) dalam disertasinya yang berjudul “Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan yang Efektif”. Disertasi ini menggali keberhasilan 2 SMK yaitu SMK PIKA dan SMK Mikael yang dianggap baik di Indonesia dan menjabarkan "rahasia" manajemen efektif yang dijalankan disana. Disertasi setebal hampir 10 cm ini penuh dengan informasi, data dan analisis yang pasti akan sangat berguna untuk dipakai oleh para pengambil kebijakan, praktisi dan akademisi pendidikan vokasi Indonesia.

Sedangkan Fawaid, Ramdani, Sulaiman, Nurtanto (2016) dalam jurnalnya yang berjudul “Kajian Pengembangan *Green school* di Pendidikan Kejuruan Di Banten”. Penelitian ini mengkaji pentingnya pengembangan *green school* di pendidikan kejuruan yang memiliki potensi pencemaran yang lebih besar dibandingkan dengan pendidikan umum. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan *green school* di Provinsi Banten dinyatakan cukup baik dengan tinjauan aspek kebijakan dinyatakan cukup baik, aspek kurikulum dinyatakan cukup baik, aspek sarana pendukung dinyatakan cukup baik, dan aspek partisipasi warga sekolah dinyatakan cukup baik. Pengembangan *green vocational school* selayaknya mengoptimalkan empat ranah tersebut sehingga dapat memacu perkembangan kualitas dan kuantitas implementasi *green school* di pendidikan kejuruan.

Penelitian tersebut didukung oleh Musriani (2016) dalam jurnalnya yang berjudul *Green Shool* (Sekolah Hijau) di SMA Negeri 12 Makassar bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana *Green school* (sekolah hijau) di SMA Negeri 12 Makassar?, (2) Apakah faktor pendorong dan penghambat *Green school* di SMA Negeri12 Makassar?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *Green school* (Sekolah Hijau) di SMA Negeri 12 Makassar terlaksana sesuai indikator pedoman adiwiyata. Hal tersebut dilihat dari kebijakan sekolah; visi misi berwawasan lingkungan, ekstrakurikuler remaja cinta lingkungan (RCL), semua mata pelajaran terintegrasikan mengembangkan materi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pemberian *reward*, aksi peduli lingkungan dengan menanam pohon, pengelolaan dan pemanfaatan sampah, pembuatan pupuk kompos dan kerja sama Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Yayasan Makassar *Green school*, dan Mitra SMP Negeri 8 Makassar, sosialisasi hemat listrik dan ATK. Sarana dan prasarana pembelajaran lingkungan yang ramah lingkungan yaitu rumah *Composting*, *Green Hause*, dan Toga. Pelaksanaan *Green school* di SMA Negeri 12 Makassar merupakan gerakan penyelamat lingkungan dan terdapat pola hubungan antara manusia dan lingkungan yang seimbang. (2) Faktor pendorong bahwa SMA Negeri 12 Makassar memiliki visi misi menghasilkan lulusan yang berprestasi, berakhlak, bertaqwa dan berbudaya serta berwawasan lingkungan dan kebijakan Pemerintah Kota Makassar bahwa semua sekolah berwawasan lingkungan dan Faktor penghambat dari segi waktu dan dana operasional perbaikan sarana dan prasarana pendidikan lingkungan.

Menurut Hidayanti, et al. (2016) Perilaku Warga Sekolah dalam Implementasi Adiwiyata di SMK Negeri 2 Semarang. Penelitian ini untuk mengeksplorasi sikap anggota SMK Negeri 2 Semarang tentang penerapan program adiwiyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa empat indikator adiwiyata yang terdiri dari kebijakan sekolah berbasis lingkungan, kurikulum berbasis sekolah lingkungan, kegiatan berbasis sekolah partisipatif dan infrastruktur berbasis sekolah lingkungan telah berhasil dilaksanakan di SMK Negeri 2 Semarang sebagai dibuktikan oleh keberhasilan pengelolaan taman, penghijauan, kebersihan dan penurunan budaya, *reduce*, dan daur ulang kesuksesan didukung oleh kebiasaan, pengetahuan, dan tindakan nyata yang membutuhkan peraturan sekolah yang jelas dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Program Adiwiyata di SMK Negeri 2 Semarang perlu dilestarikan, ditransmisikan, dan didistribusikan ke sekolah atau komunitas lain.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Sekolah Kejuruan berbasis *green school* di sekolah kejuruan sangat penting dilakukan karena setiap SMK memerlukan upaya-upaya sistematis, terprogram dan terencana untuk meningkatkan kualitas kinerjanya yang berwawasan lingkungan dan peduli terhadap lingkungan.

C. Alur Pikir

Manajemen sekolah kejuruan berbasis *green school* merupakan bagian dari sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, kegiatan perencanaan,

tanggungjawab, praktik, prosedur, proses dan sumber daya untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, mengkaji dan memelihara kebijakan lingkungan. SMKN 2 Depok dikenal sebagai sekolah yang menerapkan program Adiwiyata, yaitu *Green school*. Namun kenyataannya sistem manajemen tidak berjalan efektif, karena dipengaruhi oleh faktor internal sekolah dan eksternal: *pertama* faktor internal sekolah yaitu: (1) seluruh warga sekolah kurang ada perhatian terhadap lingkungan hijau sekolah; (2) peran kepala sekolah kurang dalam mengembangkan kebijakan bersih lingkungan sekolah; (3) kurikulum pendidikan lingkungan hidup (PLH) kurang mendapat perhatian; (4) tidak ada guru bidang PLH yang profesional; (5) program PLH membutuhkan ekstra biaya yang tinggi; dan (6) sarana prasarana penunjang sudah rusak tanpa ada pergantian yang baru. *Kedua* faktor eksternal sekolah yaitu: (1) implementasi kurikulum 13 telah menghapus PLH, sehingga tidak ada mata pelajaran tentang PLH di sekolah; (2) tidak ada guru mata pelajaran PLH yang professional; (3) pemerintah daerah tidak mampu mengambil kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dengan peningkatan jenjang guru PLH menjadi Magister PLH; dan (4) pemerintah tidak serius dalam memberi perhatian terhadap PLH.

Apabila PLH tidak mendapat perhatian yang serius di sekolah maka akan berdampak kepada lingkungan sekolah menjadi: (1) tidak bersih atau kotor; (2) kurang ada oksigen yang cukup; (3) lingkungan sekolah semakin panas; (4) lingkungan sekolah tidak dapat dijadikan obyek pembelajaran; (5) konsep pembelajaran lingkungan akan membutuhkan biaya karena semuanya tidak disediakan oleh alam lingkungan; (6) tidak mudah dicerna oleh peserta didik,

karena peserta didik disuguhkan materi yang sifatnya abstrak; (7) suasana tidak nyaman memungkinkan peserta didik mengalami kejenuhan ketika menerima materi; dan (8) tidak memberi peluang untuk untuk berimajinasi.

Oleh karena itu sekolah kejuruan berbasis *green school* di SMKN 2 Depok harus dikembangkan menjadi lingkungan yang dapat membuat: (1) peserta didik dibawa langsung ke dunia konkrit tentang penanaman konsep pembelajaran, sehingga peserta didik tidak hanya bisa menghayalkan materi; (2) lingkungan dapat digunakan setiap saat, kapanpun, dimanapun, sehingga tersedia setiap saat, tetapi tergantung dari jenis materi yang sedang diajarkan; (3) konsep pembelajaran lingkungan tidak membutuhkan biaya karena semuanya telah disediakan oleh alam lingkungan; (4) mudah dicerna oleh peserta didik, karena peserta didik disuguhkan materi yang sifatnya konkrit bukan abstrak; (5) suasana yang nyaman memungkinkan peserta didik tidak mengalami kejenuhan ketika menerima materi; dan (6) memberi peluang untuk berimajinasi.

Manajemen sekolah berbasis *green school* di SMKN 2 Depok Sleman sangat ditentukan oleh manajemen kebijakan sekolah yang dalam hal ini sangat berkaitan dengan kebijakan kepala sekolah SMKN 2 Depok yaitu: (1) kepala sekolah sebagai perencana mewujudkan *green school*, melalui rencana yang strategis agar tujuan dan manfaat *green school* dapat dirasakan semua warga sekolah; (2) kepala sekolah sebagai pengkoordinir harus menyusun dengan baik struktur organisasi sekolah dan struktur dalam pelaksanaan *green school* agar kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik; (3) kepala sekolah sebagai motivator harus memberikan motivasi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan (4)

kepala sekolah sebagai inovator harus mempunyai rencana yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan sekolah.

Manajemen kebijakan kepala sekolah harus ditopang oleh: (1) pengetahuan setiap individu warga sekolah terhadap lingkungan dan masalahnya; (2) kesadaran dan kepekaan setiap individu warga sekolah terhadap lingkungan dan masalahnya; (3) sikap setiap individu warga sekolah untuk berperan serta secara aktif di dalam peningkatan dan perlindungan lingkungan; (4) keterampilan setiap individu warga sekolah dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah lingkungan; (5) partisipasi setiap individu warga sekolah untuk berperan serta secara aktif dalam pemecahan masalah lingkungan; dan (6) evaluasi setiap individu warga agar memiliki kemampuan mengevaluasi pengetahuan lingkungan ditinjau dari segi ekologi, sosial, ekonomi, politik, dan faktor-faktor pendidikan.

Mengacu kepada penjelasan Majumdar (2011) mengusulkan lima dimensi *Green Vocational School*, yaitu: *green campus*, *green curriculum*, *green community*, *green research*, dan *green culture*. Didukung juga oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 5 tahun 2013: Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata pasal 2 menyebutkan Komponen Program Adiwiyata, meliputi (1) aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan meliputi visi misi dan tujuan sekolah, arah pengembangan kebijakan dan struktur kurikulum pendidikan; (2) aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan meliputi tenaga pendidik yang mengimplementasikan strategi belajar mengajar dan kegiatan peserta didik berbasis lingkungan; (3) aspek kegiatan

sekolah berbasis partisipatif meliputi kegiatan dan pengelolaan sekolah berbasis lingkungan dan menjalin kemitraan dengan pihak terkait; dan (4) aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan meliputi ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan, dan peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana tersebut.

Dari dua hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan tentang sekolah kejuruan yang berbasis *green school* dimana pengelolaan manajemen sekolah dalam melakukan implementasi program sekolah kejuruan berbasis *green school* memperoleh input dari lembaga pendidikan yang meliputi: (1) Kebijakan Kepala Sekolah (visi, misi, tujuan, dan sasaran); (2) Kurikulum; (3) Sumber daya sekolah; (4) Partisipasi warga sekolah; dan (5) Sarana dan Prasarana.

Berdasarkan *input* tersebut pengelolaan manajemen sekolah berbasis *green school* dengan melibatkan peran serta tenaga pendidik dan kependidikan dan peserta didik serta komite sekolah dan masyarakat dan menjalin hubungan dengan dinas pendidikan dalam melakukan manajemen: (1) Perencanaan yang terdiri dari kegiatan: (1) perencanaan (*planning*) yang terdiri dari, penetapan tujuan, rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, dan program; (2) Pengorganisasian (*organizing*) yang meliputi uraian tugas dan tanggungjawab; (3) Pelaksanaan (*actuating*) yang meliputi, sumber daya (SDM, biaya, sarana prasarana), koordinasi, partisipasi, dan kepemimpinan; (4) Pengawasan (*controlling*), yang terdiri dari, menilai pelaksanaan program yang sedang berjalan, menilai hasil kinerja, dan pelaporan.

Penguatan penerapan manajemen sekolah kejuruan berbasis *green school* di SMKN 2 Depok dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen seperti monitong dan pelaporan serta cakupan kegiatannya yang terdiri dari: penetapan tujuan; rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah; kebijakan; program; pengadaan sumber daya (SDM, biaya, sarana prasarana), partisipasi, koordinasi dan kepemimpinan. Secara rinci alur pikir penelitian dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Alur Pikir Manajemen Sekolah Kejuruan Berbasis *Green school* di SMK N 2 Depok Sleman

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah yang telah dikemukakan serta dengan mengacu pada kajian teori dan alur pikir maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah manajemen kebijakan sekolah kejuruan berbasis *green school* di SMKN 2 Depok?
2. Bagaimanakah manajemen kurikulum sekolah kejuruan berbasis *green school* di SMKN 2 Depok?
3. Bagaimanakah manajemen sumber daya sekolah kejuruan berbasis *green school* di SMKN 2 Depok?
4. Bagaimanakah manajemen partisipasi warga sekolah kejuruan berbasis *green school* di SMKN 2 Depok?
5. Bagaimanakah manajemen sarana dan prasarana sekolah kejuruan berbasis *green school* di SMKN 2 Depok?
6. Apa kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan program *green school* di SMKN 2 Depok?
7. Apa model manajemen sekolah kejuruan yang efektif untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan program *green school* di SMKN 2 Depok Sleman?